



<https://doi.org/10.56552/jisipol.v4i1.82>

Institusionalisasi Pendidikan Politik PDI Perjuangan Dalam Sekolah Partai Bagi Calon Kepala Daerah 2020

¹⁾Shahril Hasibuan , ²⁾Chusnul Ma'riyah

^{1), 2)}Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Email: shahrilhasibuan12@gmail.com

Abstract

The School of Party is the strategies design for PDI Perjuangan to prepare the political leadership for the regional head through simultaneous local elections. The simultaneous regional elections in the midst of the Covid-19 pandemic, the practice of oligarchic and dynastic politics, as well as the presidential threshold rules make the parties flock towards a vote-seeking orientation and oriented towards official-seeking so that political parties do not lead to increasing the capacity of cadres and members of the party. alone. The results of this author's research through the process of in-depth interviews and written statements from resource persons. By using qualitative methods in the form of case studies. By using the concepts of Gunther and Diamond (2001; 2003), Wolinetz (2002) regarding the types and functions of political parties in designing political institutions with party policies in the theory of design institutions (institutional design) Goodin (1998. Party school as a PDI Perjuangan's design in preparing and produce the regional leadership to be in line with the President, which is of course in line with the PDI Perjuangan, because the President is a party official from the PDI-P. This is because the 2020 simultaneous regional head elections will form a coalition. The Party School becomes a design institution, namely the creation of a design. PDI Perjuangan's vision and mission to be able to uniform regional and central policies as PDI Perjuangan's policy with its ideological aspects.

Keywords: The School Party, PDI Perjuangan, Political Education, Design Institution, Local Executive

Abstrak

Sekolah Partai sebagai rancangan strategis PDI Perjuangan dalam mempersiapkan kepemimpinan politik sebagai kepala daerah melalui pilkada serentak. Pilkada serentak 2020 ditengah kondisi pandemic Covid-19, praktek oligarki dan politik dinasti, serta aturan presidential threshold menjadikan partai beramai-ramai ke arah orientasi vote-seeking dan berorientasi pada official-seeking sehingga partai politik tidak mengarah pada peningkatan kapasitas kader dan anggota partai itu sendiri. Hasil penelitian penulis ini melalui proses wawancara mendalam dan pernyataan tertulis dari narasumber. Dengan menggunakan metode kualitatif dalam bentuk studi kasus. Dengan menggunakan konsep Gunther dan Diamond (2001; 2003), Wolinetz (2002) mengenai tipe dan fungsi partai politik dalam merancang kelembagaan politik dengan kebijakan partai dalam teori design institution (rancangan institusi) Goodin (1998. Sekolah Partai sebagai rancangan PDI Perjuangan dalam mempersiapkan dan menghasilkan kepemimpinan daerah untuk selaras dengan Presiden yang tentunya selaras dengan PDI Perjuangan, sebab Presiden adalah petugas partai yang berasal dari PDI Perjuangan. Hal ini dikarenakan pilkada serentak 2020 terbangunnya bentuk koalisi.. Sekolah Partai menjadi rancangan institusi (design institution), yaitu terciptanya suatu perancangan visi dan misi PDI Perjuangan untuk dapat menyeragamkan kebijakan daerah dan pusat sebagai kebijakan PDI Perjuangan dengan aspek ideologisnya.

Kata Kunci: Sekolah Partai, PDI Perjuangan, Pendidikan Politik, Rancangan Institusi, Eksekutif Daerah



PENDAHULUAN

Partai sebagai institusi politik dengan kredibilitasnya diharuskan untuk mampu melakukan proses penyaringan dan penjaringan dalam melakukan rekrutmen, guna menghasilkan kepemimpinan politik. Dasar politik partai secara ideologis adalah pencapaian pendidikan politik untuk dipersiapkan dalam memenangkan parlemen dan pemilihan umum sehingga keberlangsungan institusi politik yang berpusat pada negara dapat terus berkonsistensi (Koopmans, 2003). Bahwa Partai menghasilkan kebijakan politik melalui kepemimpinan bagi aspek kehidupan konsistituen yaitu dapat menterjemahkan aspirasi dan kepentingan masyarakat sebagai konstituen (Surbakti, 2011). Untuk mencapai kepentingan pokok tersebut dengan membangun kemajemukan yang seragam sebagai penyaluran Presiden dan kepala daerah dalam kebijakan partai sebagai bentuk tata kelola partai merupakan tata kelola negara. PDI Perjuangan mengagregasi kebijakan institusi politik, secara umum mengarahkan kepentingan partai dalam merancang dan membentuk legislasi dan kebijakan untuk menjadi agenda yang diarahkan sebagai kepentingan bagi masyarakat untuk mendapatkan dukungan masyarakat itu sendiri di saat pemilihan umum. (Meyer 2012:26).

Untuk pencapaian tersebut diperlukannya program pendidikan politik yang harus dimiliki oleh setiap partai politik. Partai politik membentuk institusi pendidikan politik untuk mempersiapkan kader dan keanggotaan sebagai petugas partai ataupun pekerja partai bagi kandidat pencalonan kepala daerah. Terlebih adanya UU Nomor 2 tahun 2011, mengenai penyelenggaraan pendidikan politik, sehingga partai politik memiliki program dalam meningkatkan kapasitas kader dan dipersiapkan menjadi pemimpin politik, yang adalah tugas dan fungsi dari partai politik tersebut. Sehingga penyelenggaraan pendidikan politik di antara fungsi dan tugas partai politik adalah menghasilkan kepemimpinan politik. Serta untuk dapat membangun citra partai sebagai partai yang memiliki program dan menghasilkan kepemimpinan bagi kebijakan ideologis partai politik.

Penyelenggaraan pendidikan politik bagi kader dan anggota partai, serta rekrutmen terbuka melalui sosialisasi politik menjadi hal yang diteliti dari setiap akademisi ilmu politik, dan hanya sebatas pada bentuk kaderisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh partai politik, guna peningkatan kapasitas bagi kader dan anggota partai. Tetapi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan politik melalui adanya sekolah politik, atau bagi PDI Perjuangan sebagai Sekolah Partai dalam mempersiapkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Cakada) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sebagai hal yang baru (*novelty*). Sehingga dalam hal ini penulis mengkaji Sekolah Partai PDI Perjuangan

yang berfokus pada Pilkada Serentak 2020. Hal ini dikarenakan Sekolah Partai menjadi hal yang bersifat terbuka bagi kader partai lain, yang membangun koalisi dalam pilkada serentak di tahun 2020, sehingga setiap cakada yang didukung oleh DPP PDI Perjuangan wajib untuk mengikuti Sekolah Partai.

Penyelenggaraan pendidikan politik oleh partai, juga dapat ditemui di beberapa negara, seperti halnya di Thailand. Thailand terdapat partai politik yang mengelola sistem pendidikan terarah dalam menghasilkan rancangan institusi pendidikan politik. Guna menghasilkan para profesional untuk menjadi petugas partai atau pun pekerja partai tanpa melulu menduduki struktur kepartaian. Partai Demokrat dan Partai Puea Fah Din merupakan salah satu contoh partai yang membangun dan mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakat pada usia remaja. Kedua partai tersebut memiliki pengalaman dalam pembentukan institusi pendidikan politik dan merancang kepemimpinan dalam menghasilkan profesional yang dipersiapkan menjadi petugas partai dan menjadi politikus bila memiliki kecenderungan dalam memahami ideologi politik partai. Keduanya pun memiliki stasiun televisi dan radio yang menayangkan isu-isu dan program politik.

Dalam pendidikan politik Partai Puea Fah Din mendirikan sekolah politik kepartaian ke dalam bentuk Komunitas Asoke. Komunitas Asoke merancang seleksi kepemimpinan secara meritokrasi ke dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan sosialisasi dalam melakukan rekrutmen secara langsung bagi masyarakat usia dewasa. Partai mendirikan sekolah formal untuk memberikan pendidikan politik sebagai kurikulum muatan lokal yang disusun oleh Badan-badan Struktural Partai Puea Fah Din, dan dari sinilah adanya suatu pembinaan kepemimpinan dalam membentuk profesionalitas anggota partai untuk mengisi jabatan-jabatan profesi dalam rancangan jangka panjang. Komunitas Asoke juga mempersiapkan para profesional dikalangan masyarakat secara terbuka menciptakan sistem meritokrasi. Komunitas Asoke adalah penyelenggaraan sekolah partai yang diselenggarakan oleh Partai Pue Fah Din, dan berdiri sendiri. Bahwa elit partai tidak melakukan dominasi ataupun campur tangan terhadap Komunitas Asoke baik dalam segala kegiatan dan prosesnya. Karena di satu sisi Komunitas Asoke dapat menjadi organisasi masyarakat sipil, sehingga bersifat independen walaupun bagian dari Partai Pue Fah Din, seperti halnya dalam pendirian sekolah formal bagi masyarakat. (Sirivunnabood, 2016).

Hal yang berbeda dengan Partai Demokrat, dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat di 9 Propinsi Thailand, lebih memfokuskan dalam penguasaan parlemen di tingkat daerah hingga secara nasional, yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan politik secara terbuka bagi masyarakat. Sejak tahun 2013 Partai Demokrat membentuk *The People's Democratic Reform Committee*,

dengan keanggotaan secara terbuka untuk dapat mengikuti pendidikan politik secara berjenjang. Dengan proses yang berkelanjutan maka Partai Demokrat akan mencalonkan mereka yang telah mengikuti pendidikan politik kepartaian berjenjang dan berkelanjutan, secara prosedural, akan ditunjuk oleh partai untuk maju dalam pemilihan senat dan legislatif. Dengan sumber pendanaan dari partai politik itu sendiri, yang keanggotaannya memiliki iuran wajib. Sehingga menjadi elit politik sebagai senator ataupun legislator tidak secara instan, tetapi melalui proses pendidikan berjenjang dan berkelanjutan dengan sistem penilaian dalam memahami teoritis dan praktis ideologi kepartaian. (Sirivunnabood, 2016).

Pendidikan politik berkorelasi bagi perkembangan demokrasi, dengan penekanan pada disiplin partai politik sebagai institusi politik bagi perencanaan dan dalam menjalankan visi-misi partai untuk diaktualisasikan terhadap arah kebijakan politik, dan dasar ideologis. Dengan tujuan akhir adalah mempersiapkan kepemimpinan politik yang memiliki dasar ideologi partai. Untuk dapat menduduki jabatan publik tentunya melalui proses demokrasi berupa pemilihan umum. Kurikulum pendidikan politik tersebut menjadi suatu platform partai dalam memberikan suatu keyakinan bagi konstituen untuk menjadi bagian dari elit politik, karena pendidikan politik bersifat terbuka dan menjadi sarana dalam proses rekrutmen (Peterson, 2019). Pengembangan dan perencanaan pendidikan politik yang diselenggarakan partai politik diharapkan bukan sebagai suatu bentuk seremonial dalam menghadapi dan mempersiapkan pemilu dan pilkada. Karena partai politik diharapkan sebagai institusi politik mampu mendesain atau merancang kepemimpinan. Hal ini partai politik dengan kapasitasnya diharuskan memiliki kemampuan mengembangkan institusi kepartaiaannya membentuk inovasi bagi pembentukan arah demokrasi didasarkan pada ideologi partai dan menjadi suatu rancangan institusi (*design institution*) (Meydani, 2009; Koopmans, 2003; Smith, 2009) bahwa tugas partai politik memberikan arah transformasi politik melalui penyelenggaraan pendidikan politik guna terbangunnya model partai politik dalam merancang kepemimpinan, dan melalui proses edukasi/pendidikan yang berkonsistensi dan berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas partai politik dalam menghasilkan dan melegitimasi kepemimpinan.

Penguatan kapasitas partai politik bagi penyelenggaraan pendidikan politik, berupa adanya sekolah politik inilah (Lee, 2015) diselenggarakan melalui pengembangan instrument politik secara organis dan berjenjang untuk mengarah pada suatu pola rekrutmen dan penguatan internalisasi kader politik yang dirancang secara selaras dan bersinergi yaitu ideologi partai adalah kebutuhan bagi konstituen untuk ikut serta menentukan kepemimpinan politik melalui proses demokratisasi di

tubuh partai politik itu sendiri. Bahwa adanya sekolah partai sebagai bentuk dalam penyelenggaraan politik bagi calon kepala daerah merupakan saluran untuk menghasilkan kepemimpinan politik sebagai bagian dari tiga pilar partai. Terutama dalam membentuk eksekutif daerah sebagai suatu bentuk manajerial kepartaian dalam menghadapi tantangan dari suatu perubahan itu sendiri.

Untuk bagaimana partai politik mempersiapkan calon kepala daerah, sebagai petugas partai yang akan menjalankan dan melaksanakan kebijakan partai dan visi-misi partai di masa transisi saat ini. Partai politik sebagai alat produksi dalam menghasilkan kepemimpinan politik (Schumpeter, 1994) melalui rancangan institusi yang melibatkan partisipasi masyarakat (konstituen), terutama bagi masyarakat yang telah menentukan pilihan politik akan kepartaian yang berelasi dengan jumlah kursi legislatif pada tingkatan daerah maupun secara nasional.

Rancangan institusi tersebut menghasilkan inovasi demokratis (Smith, 2009; Goodin, 2008) bagi partai politik yang menumpukan kerja partai dalam meningkatkan kapasitas pengkaderan, sebagai arah tujuan dalam menyelenggarakan pendidikan politik, terpublikasi ke dalam ruang publik, yaitu partai politik sebagai institusi penyelenggaraan pendidikan politik membentuk instrument kelembagaan demokratis yang bermakna partai politik merancang, membentuk, dan menghasilkan inovasi kebijakan dalam mengupayakan dan membentuk tata kelola partai sebagai tata kelola negara melalui penguasaan daerah pemilihan, sehingga partai politik harus mampu menyusun kebijakan sistem pemilihan umum, yang memberikan bentuk deliberasi politik. Karena dalam penyelenggaraan pendidikan politik (Goodin, 2008; Goodin & Tilly, 2013) merupakan hasil dan tujuan partai sebagai institusi dalam merancang demokrasi dan memproteksi kekuasaan dengan segala konsekuensi logisnya sebagai bentuk deliberasi politik dalam upaya memenangkan pemilu dan melegitimasikannya.

Untuk mencapai integrasi birokrasi politik dan administrasi kebijakan publik sebagai rancangan institusi partai dalam menghasilkan kepemimpinan. Bahwa partai politik menjadi institusi politik adalah menghasilkan personalitas kader dan elit untuk terpromosi atau menjadi *endorse* dalam tingkat kepercayaan masyarakat yang terarah bagi pendidikan politik dan diselenggarakan oleh partai politik guna menghasilkan demokratisasi kepemimpinan berupa; menghasilkan rekomendasi bagi masyarakat dalam menentukan calon pemimipin yang akan dipilihnya, dan adanya koeksistensi kerjasama (koalisi) antar partai politik (Callan, 1997).

Penulis di dalam penelitian ini mengkaji, bagaimana PDI Perjuangan merancang Sekolah Partai sebagai institusi pendidikan politik dalam mempersiapkan Pilkada 2020?, dan mengapa PDI Perjuangan menyelenggarakan Sekolah Partai untuk

calon kepala daerah/ wakil kepala daerah yang diusung dan didukung pada Pilkada 2020? Hal ini menjadikan penyelenggaraan sekolah partai dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020 terbuka bagi kader partai lain yang didukung oleh PDI Perjuangan melalui kerjasama partai dengan membangun arah koalisi bagi kepemimpinan daerah, dan menjadi suatu programatik ideologis kepartaian PDI Perjuangan untuk mengaggregasi ideologi bagi kader partai lain. serta upaya PDI Perjuangan dalam penyeragaman arah kebijakan kekuasaan eksekutif, dari adanya koalisi dalam setiap daerah pemilihan kepala daerah serentak 2020. Dengan suatu tujuan Bahwa Sekolah Partai sebagai bentuk legitimasi PDI Perjuangan untuk menegaskan adanya dinasti politik dalam proses rekomendasi DPP PDI Perjuangan, karena melalui Sekolah Partai setiap Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Cakada) baik yang diusung dan yang didukung oleh DPP Partai akan menjalankan visi dan misi kebijakan PDI Perjuangan dalam tata kelola negara.

Hasil penelitian ini memberikan referensi baru bagi praktisi politik dalam kepartaian dan partai politik melakukan penyelenggara pendidikan politik berupa sekolah politik kepartaian dalam mempersiapkan kepemimpinan politik akan pemilu, dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bahwa sekolah politik yang dibangun dan diselenggarakan oleh partai politik dapat menjadi bagian pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat untuk tujuan pilkada.

KAJIAN PUSTAKA

Penyelenggaraan pendidikan politik merupakan hasil dan tujuan partai politik dalam fungsinya merancang kepemimpinan politik serta memproteksi kekuasaan dengan segala konsekuensi logisnya yang harus dipersiapkan dalam ranah kehidupan demokrasi untuk menghasilkan dan mengintegrasikan kebijakan kekuasaan dengan kebijakan partai politik. Seperti halnya kekuasaan eksekutif dalam membangun birokrasi politik dan administrasi kebijakan publik diselaraskan dengan kebijakan partai politik. Kesemuanya dirancang oleh partai politik sebagai suatu pandangan institusi baru (Goodin, 2008; 2013). Bahwa rancangan institusi sebagai institusi baru adalah pembentukan interaksi politik yang didapat dalam proses transisi dan transformasi, dari sistem otoriter menjadi sistem demokrasi dengan kebebasan yang berkembang ke dalam institusi politik berupa adanya transaksi dan kontrak politik. Terbentuknya kolaborasi bersama aktor-aktor politik merancang kepemimpinan yang disesuaikan dengan asas partai. (Goodin, 1998).

Teori rancangan institusi (*design institution*) adalah bentuk dalam pengembangan teori institusi baru (*new institutional*) atau *neoinstitutionalism* (Thilo Lang, 2018; Budiardjo, 2012; Lowndes & Roberts, 2013) memiliki tiga pendekatan yaitu

pertama, secara *tradisional sosiologis* adalah mengenai kepemimpinan dan struktur regulasi yang memberikan pengaruh pada pendekatan psikologi sosial. *Kedua*, pendekatan psikologi sosial adalah pendekatan perilaku (*behaviour*), yang menitikberatkan pada suatu regulasi normatif secara kelembagaan formal maupun informal, yang memberikan pengaruh bagi aktor politik untuk bersikap sebagai bagian dalam struktural kelembagaan, secara formal dalam bentuk terbangunnya keseragaman, dan secara informal sebagai bentuk *pluralistik* terhadap norma dan regulasi yang dibangun oleh karakteristik institusi itu sendiri. Serta yang *ketiga*, pendekatan ekonomi sebagai suatu pengembangan terhadap pilihan rasional, terbentuknya strategi kelembagaan sebagai agen yang memproduksi kepemimpinan dan kapasitas sumber daya kelembagaan.

Ketiga pendekatan dalam rancangan institusi tersebut adalah tersusunnya suatu pola transaksi dan kontrak politik dalam suatu kolaborasi aktor. Kaitannya dengan kelembagaan politik, aktor politik membentuk kepemimpinan yang disesuaikan dengan asas partai sebagai institusi politik (Goodin, 1998), berupa pakta atau deal-deal ke dalam bentuk kesepakatan akan penggunaan kekuasaan (*power launch agreements*), transaksi (*horse trades*), pengumpulan suara (*vote swaps*), dan arah tindakan dalam tingkatan formal yaitu kontrak dan koalisi. Kesemuanya akan memberikan komitmen politik sebagai arah dalam menghasilkan profit berupa menyatunya kebijakan dan visi misi menjadi programatik kekuasaan dalam pengelolaan institusi politik yang lebih luas, yaitu negara. Para aktor menentukan bentuk dan sifat institusi, sehingga diperlukannya perencanaan bagi penguatan institusi negara, dari adanya bentuk transformasi, guna memperbaiki arah dan tujuan negara bukan dalam mengupas lembaga-lembaga kenegaraan. Maka diperlukannya suatu cara yang praktis untuk dapat merencanakan atau mendesain arah tujuan partai (Budiardjo, 2012) Hal tersebut diawali dari Partai merancang tata kelola pemerintahan melalui penyusunan kebijakan partai politik dengan kapasitasnya sebagai institusi politik, menata kelola partai adalah juga menata kelola negara. (Shepsle, 1998), dan memberikan suatu karakteristik partai politik ke dalam institusionalisasi yaitu sebagai entitas independen dalam membentuk struktur politik dan pola perilaku partai (Heyword, 2013; Gunther & Diamond, 2001).

Karakteristik entitas struktur dan perilaku partai mengarah pada tipe partai sebagai hasil dari adanya transisi politik, partai dengan akar tradisi pendirian partai (Gunther & Diamond, 2003), dan menghasilkan lima belas tipe partai. Akar tradisi pendirian partai tersebut sebagai bentuk partai berbasis; elit, massa, etnisitas, elektoralis, dan pergerakan. Partai politik yang berdiri hasil dari adanya transisi mengalami dan dipengaruhi dari adanya gerak mobilitas demokrasi yang bernama

pemilihan umum. Partai mengarah pada suatu bentuk transformasi partai yang dipengaruhi dari pasang surutnya partai melalui hasil pemilihan umum (Wolinetz, 2002), sehingga menghasilkan enam dasar tipe partai dengan tiga orientasi partai yang bergerak mengikuti kondisi politik secara popularitas.

Partai secara pragmatis yang menghasilkan suatu orientasi pada pencapaian jumlah suara *Vote-seeking* bahkan mempertahankan kekuasaan dengan memobilisasi *apparatus* dan birokrat yang mengarah pada suatu politik patron dan politik kartel terorientasi ke dalam *Office-seeking*. Partai secara idealnya menurut Wolinetz adalah mengutamakan dan mempertahankan identitas partai dengan dasar ideologi partai, sehingga partai akan merancang suatu kebijakan partai dan menjadi orientasi ke dalam *Policy-seeking*. Hal inilah partai melakukan suatu pengembangan pendidikan politik guna mempersiapkan dan menghasilkan kepemimpinan sebagai entitas dari akar pendirian partai dengan penguatan kapasitas partai melalui ideologi dan pendidikan politik (Lee, 2015; Peterson, 2019). Entitas tersebut menjadikan partai memiliki fungsi dan peranannya dalam menyusun pelebagaan pemilihan umum, membangun komunikasi politik, melakukan proses rekrutment, menyelenggarakan pendidikan dan sosialisasi politik, serta melakukan agregasi kepentingan. (Gunther & Diamond, 2001).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus sekolah partai PDI Perjuangan dalam memberikan pembekalan dan persiapan bagi calon kepala daerah, pada pilkada serentak 2020. Studi kasus adalah desain penelitian yang dilakukan dari adanya bentuk peristiwa yang secara cermat untuk menyelidiki suatu program, kegiatan, aktivitas, proses dan suatu tujuan yang dilakukan individu atau kelompok (Creswell, 2014). Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktifitas, dan penelitian ini mengumpulkan informasi secara detail untuk dapat mengumpulkan berbagai data berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Dengan cara *purposive*, yaitu upaya mendapatkan data dengan kriteria-kriteria tertentu didasarkan pada suatu pertimbangan yang terarah dalam mengidentifikasi peranan subyek terhadap isi pokok yang diteiliti. Bahwa studi kasus pada metode kualitatif adalah sesuatu yang dikembangkan akan adanya peristiwa, program suatu penyelenggaraan yang telah berlangsung dan adanya suatu keberlanjutan dalam program penyelenggaraan tersebut, dan aktivitas, serta pengevaluasian suatu tindakan dalam peranan dan aktifitas didasarkan dari periode waktu tertentu (Creswell, 2014). Dalam pengumpulan data kualitatif, didapat melalui wawancara, yang penulis dapatkan melalui wawancara yang mendalam baik terstruktur maupun tidak sebagai data utama (Creswell, 2014).

Wawancara mendalam dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Bapak Djarot Syaiful Hidayat pada tanggal 31 Agustus 2021 di Gedung B Lt.Dasar DPP PDI Perjuangan, serta pernyataan atau jawaban tertulis dari Kepala Sekolah Partai sekaligus adalah Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Bapak Komarudin Watubun mengenai Sekolah Partai pada tanggal 4 September 2021. Pengumpulan data pun dilakukan dengan penggunaan media sosial, dikarenakan adanya digitalisasi yang merekam kegiatan penyelenggaraan Sekolah Partai bagi calon kepala daerah yang dilakukan secara berkelanjutan dan berketerkaitan. Dalam hal ini pada penyelenggaraan Sekolah Partai dalam mempersiapkan dan pembekalan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serentak 2020. Dengan menghasilkan suatu bentuk proposisi-proposisi yang menghubungkan suatu pelaksanaan aktifitas dalam penyelenggaraan sekolah partai dan berelasi dengan pilkada serentak 2020. Hal ini secara monumental memiliki keterkaitan suatu peristiwa, dan terus dikembangkan sebagai suatu fenomena dari adanya teoritisasi ideologis yang mengarah pada proyek-proyek empiris dan dilakukan secara berkelanjutan (Toshkov, 2016). Dalam konteks studi kasus ini, penelitian ini mengulas penyelenggaraan sekolah partai bagi persiapan calon kepala daerah. PDI Perjuangan dalam tipologi politik berupa fungsi dan peranan partai politik sebagai institusi politik, dengan pendekatan institusi baru ke dalam *design institution* (rancangan institusi) guna menghasilkan kepala daerah yang dilakukan oleh setiap partai politik. Dalam hal ini penulis berfokus pada penyelenggaraan sekolah partai yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, dalam upayanya mengutamakan kader internal untuk diusung dalam kontestasi pilkada serentak 2020, dan adanya koalisi dan kerjasama politik dalam pilkada melalui penyelenggaraan sekolah partai tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

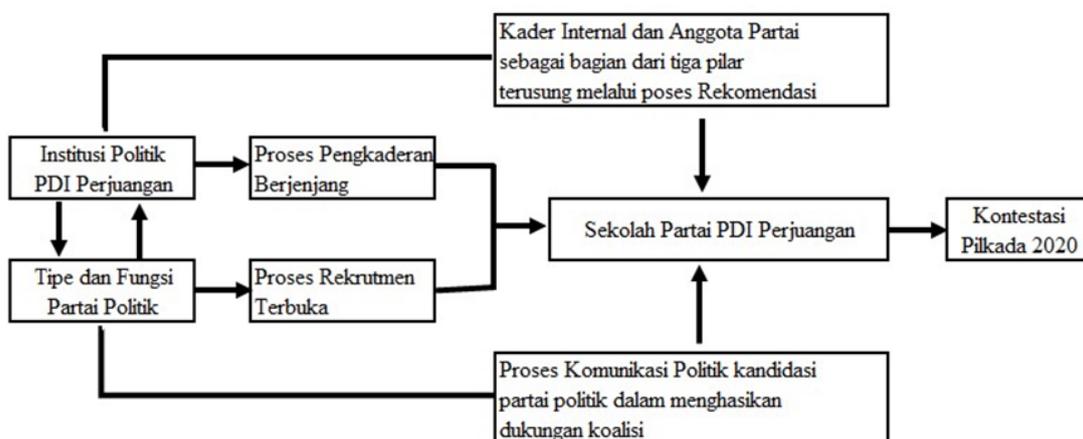
Institusi baru sebagai sesuatu hal yang berbeda dari pandangan institusi lama. Institusi lama yang berfokus pada kelembagaan negara dengan paradigma berpusat pada kondisi masyarakat terhadap keberadaan nilai dan norma yang telah terbentuk, sebagai legal formal dalam perilaku politik. Sedangkan institusi baru sebagai bentuk institusionalisme baru dengan memusatkan perhatian pada negara sebagai institusi yang menghasilkan berbagai paradigma ke arah suatu tujuan tertentu dan memerlukan suatu rancangan. Seperti dalam menghasilkan kepemimpinan bagi masyarakat atau konstituen, adalah paradigma partai politik sebagai bagian dari institusi politik. Sehingga partai politik melakukan rancangan institusi dalam membentuk dan menghasilkan proses kepemimpinan politik, melalui pemungutan suara langsung. (Budiardjo, 2012; Goodin, 2013;1998).

Fungsi dan tipe partai mempengaruhi partai politik dalam perannya merancang institusi kepemimpinan. Hal ini menjadikan pendidikan politik sebagai fungsi utama partai politik, untuk menghasilkan akurasi pengetahuan kebijakan ideologis tradisi partai (Sirivunnabood, 2016), yang terprogram membentuk kapasitas kepemimpinan dalam inklusivitas sistem demokrasi, berupa politisasi isu dan merancang agenda politik melalui mobilisasi dan pengorganisasian serta peningkatan partisipasi (Yodi, 2017).

Dalam hal ini rancangan institusi politik PDI Perjuangan dengan tipologi dan fungsi kepartaian PDI Perjuangan dalam mewujudkan kekuasaan eksekutif melalui pendidikan politik bagi eksekutif daerah, berupa Sekolah Partai. Sehingga penyelenggaraan Sekolah Partai oleh PDI Perjuangan bagi calon eksekutif daerah, guna memberikan pembekalan dan persiapan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang telah dilakukan sebanyak empat kali sejak pilkada 2015, dan adanya suatu pola koalisi. Karena sekolah partai adalah sebagai suatu bentuk kontrak politik bagi calon kepala daerah, dan memberikan pembekalan untuk berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Seperti yang dikatakan oleh Djarot, dalam wawancara yang penulis dapatkan:

“...Mereka-mereka yang ikut dalam penyelenggaraan, yang ikut sebagai peserta Sekolah Partai harus menandatangani Dasa Sila Partai. Kesepuluh Pokok mulai dari ideologi Pancasila sampai dengan persoalan-persoalan lingkungan hidup. Dasa Prasetya itu yang harus diperjuangkan ketika dia mendapatkan amanat sebagai Kepala Daerah. Sepuluh Janji kesetiaan, kesetiaan dalam memenuhi sepuluh janji. Sehingga program-program harian itu menyusun kebijakan program harus mencerminkan, harus mewujudkan sepuluh janji.”

Gambar 1. Proses Menuju Penyelenggaraan Sekolah Partai Calon Kepala/ Wakil Kepala Daerah



Sumber: Hasil Olahan Penulis

Komarudin Watubun selaku Kepala Sekolah Partai dan juga sebagai Ketua Umum Bidang Kehormatan Partai memberikan penjelasan tertulis bahwa,

“...pendidikan politik yang diselenggarakan dalam Sekolah Partai adalah upaya yang dilakukan sejalan dengan semangat perkembangan jaman tanpa kehilangan akar ideologis partai sebagai sub sistem absolut dalam bernegara, khususnya dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Karena esensi pendidikan politik merupakan upaya terus-menerus untuk menanamkan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan khususnya kepada para kader partai yang diorientasikan menjadi pemimpin politik untuk menduduki jabatan public”.

Ini sekaligus memberikan makna bahwa pendidikan politik untuk keperluan dimaksud menjadi bagian sub sistem kepartaian yang dikelola secara otonom, yakni melalui institusionalisasi sistem pendidikan politik dengan membentuk sekolah partai.

Perencanaan sekolah partai sebagai institusi pendidikan politik yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan, menjadi suatu rencana aksi dalam menghasilkan kepemimpinan eksekutif daerah, diawali dengan suatu proses rekomendasi DPP Partai bagi calon eksekutif daerah baik yang diusung dan maupun yang didukung. Setelah rekomendasi tersebut setiap calon kepala daerah diwajibkan untuk mengikuti sekolah partai.

PDI Perjuangan dalam proses rekrutmen terbuka melakukan suatu bentuk koalisi dengan partai politik lain. Tujuannya adalah dapat terbangunnya keselarasan kebijakan antara Presiden yang adalah petugas Partai PDI Perjuangan dengan calon kepala daerah dalam kontestasi pilkada serentak 2020, yang harus dimenangkan oleh PDI Perjuangan itu sendiri. Maka Sekolah Partai yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan adalah untuk mengagitasi calon kepala daerah terutama hasil koalisi PDI Perjuangan dengan partai politik lain di setiap daerah pemilihan kepala daerah serentak 2020. Dalam hal ini peserta Sekolah Partai bagi calon kepala daerah bersifat terbuka, seperti penjelasan Djarot Syaiful Hidayat dari hasil wawancara yang penulis dapatkan:

“...Kita perlu kerjasama untuk berkoalisi dengan partai-partai lain. Kalau kita bekerjasama dengan partai lain untuk memenuhi persyaratan pencalonan maka kita berjuang untuk salah satu calon atau wakil kepala daerah harus dari internal Partai. Kemudian kalau kursi kita minimalis bagaimana? Ya tentunya kita memberikan dukungana. Maka kita akan mendukung pasangan calon yang benar-benar mempunyai track record yang baik, kalau bisa punya pengalaman, tidak mempersoalkan Pancasila, tidak membikin politik SARA. Nah sehingga cakada itu, calon kepala daerah itu bisa bermacam-macam orangnya. Ada Kader, ada anggota biasa,

ada anggota yang baru masuk, atau menyebrang dari partai lain. Nah ketika melakukan cakada yang kita prioritaskan adalah kader internal, dan yang diusung oleh Partai. Maka dari pada itu Sekolah Partai kita membedakan, yang gelombang pertama adalah kader internal Partai. Gelombang kedua adalah anggota dan yang diusung oleh Partai. Gelombang ketiga adalah campuran dari kader partai lain yang mendapatkan dukungan dari DPP Partai dan yang baru menjadi anggota Partai dan diusung.” (wawancara 31 Agustus 2021 di lantai dasar Gedung B DPP PDI Perjuangan).

Hal yang dijelaskan Djarot, bahwa Sekolah Partai adalah bagian dari proses rekrutmen kepemimpinan eksekutif daerah secara terbuka yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan finalisasi rekomendasi dari DPP Partai. Ideologi partai diaktualisasikan dalam penyelenggaraan Sekolah Partai bagi calon kepala daerah. Setiap calon kepala daerah menjadi peserta didik Sekolah Partai, dan ditegaskan oleh Komarudin Watubun dalam memberikan penjelasan tertulis melalui pesan *whatsapp*, 4 September 2021:

“...Syarat dapat mengikuti sekolah partai adalah mereka yang telah mendapatkan rekomendasi DPP PDI Perjuangan sebagai cakada dan/atau telah ditetapkan KPU sesuai tingkatan menjadi cakada atas rekomendasi DPP. Untuk mendapatkan rekomendasi tersebut, seseorang perlu mengikuti seleksi melalui struktural Partai sesuai tingkatan yang dilakukan dengan sistem terbuka, tidak terbatas pada kader partai sendiri, meskipun secara subyektif tetap mengutamakan kader internal Partai. Menjadi bagian awal setelah tahapan seleksi terbuka adalah dilakukan psikotes (dan wawancara) guna menggali motivasi beserta kecenderungan/ orientasi seseorang mengajukan diri menjadi cakada. Sedangkan seleksi administrative sebagai syarat terpenuhinya pendaftaran, seorang cakada menyerahkan sejumlah berkas yang diperlukan termasuk data diri (pengalaman) yang dapat mendukung seseorang menjadi cakada.”

Lebih lanjut Komarudin Watubun memberikan penjelasan tertulis, bahwa kelayakan standarisasi cakada yang ditetapkan oleh PDI Perjuangan bagi cakada yang telah mendapatkan rekomendasi. Penjelasan tersebut sebagai penerapan standarisasi PDI Perjuangan berupa pembekalan dalam sejumlah materi bagi cakada:

“...Cakada yang mengikuti Sekolah Parta adalah mereka yang telah mendapatkan rekomendasi DPP. Sekolah Partai tidak dalam posisi menentukan kelayakan seseorang menjadi cakada. Tetapi memberi pembekalan sejumlah materi yang secara umum terkait ideologi dan sistem kepartaian, wawasan kebangsaan, kepemimpinan dan manajemen organisasi pemerintahan, strategi pemenangan. Sedangkan terkait standarisasi bagi cakada yang layak diusung dan didukung DPP menjadi bagian dari proses seleksi

terbitnya rekomendasi, beberapa diantaranya meliputi: kapasitas, aksesibilitas, elektabilitas, dan integrasi."

Penjelasan Kepala Sekolah Partai memberikan penegasan, bahwa sekolah partai adalah untuk memberikan pembekalan bagi pasangan cakada, dengan didasarkan dalam pemberian materi secara idelogis kepartaian PDI Perjuangan, dan persiapan dalam mengikuti kontestasi pllkada serentak. Namun teknis kemenangan calon kepala daerah ditentukan oleh konstituen dalam pelaksanaan pilkada serentak yang dilakukan oleh KPUD pada setiap daerah pemilihan kepala daerah serentak 2020.

Pendidikan Politik PDI Perjuangan dan Sekolah Partai

Pendidikan politik sebagai pilar demokrasi dan menjadi mesin politik dalam institusi demokrasi bahwa partai politik menjadi ruang publik bagi pelatihan kepemimpinan, sehingga proses pendidikan politik dikembangkan oleh partai politik ke dalam kaderisasi dan berkonsistensi menjadi institusi pendidikan politik guna merepresentasikan kepentingan dan aspirasi rakyat terhadap kepemimpinan politik yang akan menduduki jabatan publik melalui pemilihan legislatif ataupun pemilihan kepala daerah (Zuhro, 2019).

Dalam hal ini PDI Perjuangan dalam melakukan penyelenggaraan Sekolah Partai tertuang dalam peraturan PDI Perjuangan Nomor 04 Tahun 2019, yang dijelaskan oleh Restu Hapsari sebagai pelaksana tugas Badan Penelitian Pusat (Balitpus) menjelaskan:

"...Sekolah Partai yang terbentuk adalah penugasan kepanitiaan secara adhoc, sehingga penyelenggaraan sekolah partai adalah keputusan DPP Partai, dan sejauh ini masih diemban oleh Badiklatpus dan Balitpus, serta operasionalnya dilakukan oleh Kesekretariatan Partai. Kita tidak tahu kedepannya apakah sekolah partai kedepannya melalui Kongres Partai nantinya sebagai Badan Partai, karena setiap Badan Partai memiliki strukturnya masing-masing, walaupun sekolah partai akan terus berlangsung secara berkelanjutan." (wawancara pada tanggal 4 September 2021 di Lantai 3 Gedung B DPP PDI Perjuangan)

Dengan dasar Peraturan PDI Perjuangan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Badan-badan Partai, dan dalam Anggaran Dasar Partai pada Bab VII Pasal 89, serta diperkuat dalam Anggaran Rumah Tangga Partai dalam Bab IV Pasal 85, dari hasil Kongres V di Bali adalah memberikan suatu aturan mengenai pendidikan politik dalam menghasilkan materi pokok (wajib), dan materi tematik bagi pendidikan politik bagi tiga pilar partai. Dalam hal ini penyelenggaraan sekolah partai bagi calon eksekutif

daerah dalam mempersiapkan kontestasi pilkada serentak 2020. Maka operasional sekolah partai adalah bagian dari tata-kelola Partai, melalui Badan-badan kepartaian.

Gambar 2. Struktur Penyelenggaraan Sekolah Partai



Sumber: Focus Group Discussion Pendalaman Ideologi, Materi, dan Pengelolaan Sekolah Partai, Kongres V PDI Perjuangan, 2019

PDI Perjuangan dengan nilai-nilai ideologis kepartaian yaitu Pancasila, yang dilampirkan dalam materi dasar atau materi utama, serta adanya materi-materi dalam tata kelola birokrasi pemerintahan, maupun tata kelola politik dalam bernegara sebagai institusi politik. Materi pembelajaran Sekolah Partai mendorong calon kepala daerah untuk melakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap kebijakan Presiden, seperti halnya di tengah *pandemic* Covid 19. Serta menjadi kontrak politik bagi calon kepala daerah yang terekomendasi baik yang diusung ataupun yang didukung oleh PDI Perjuangan. Kontrak politik tersebut dikarenakan adanya calon kepala daerah yang didukung oleh DPP Partai melalui proses koalisi, sehingga untuk mengikuti Sekolah Partai semua calon kepala daerah termasuk kader internal dan anggota PDI Perjuangan harus menandatangani Dasa Sila Partai. Seperti dalam hasil wawancara penulis, yang ditegaskan oleh Jarot Syaiful Hidayat:

“...Oleh karena itu materi-materi, di samping materi-materi bermuatan penguatan ideologi Pancasila, termasuk aplikasi Pancasila di dalam tata-kelola pemerintahan di daerah. Untuk apa?!, untuk mewujudkan Trisakti dari Bung Karno, bagaimana membangun kedaulatan, mulai dari kedaulatan energi, kedaulatan pangan kan begitukan ya?, bagaimana membangun kemandirian dalam bidang ideologi?, bagaimana membangun kepribadian dalam budaya. Mereka-mereka yang ikut dalam penyelenggaraan, yang ikut sebagai peserta Sekolah Partai harus menandatangani Dasa

Sila Partai! Kesepuluh pokok mulai dari ideologi Pancasila sampai dengan persoalan-persoalan lingkungan hidup. Dasa Prasetya itu yang harus diperjuangkan ketika dia mendapat mandat sebagai kepala daerah. Sepuluh Janji kesetiaan, kesetiaan dalam memenuhi sepuluh janji."

Hal ini menjadikan materi pendidikan Sekolah Partai PDI Perjuangan mengembangkan kelembagaan politik dalam fungsinya melakukan agregasi politik yang sistematis bagi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Lebih lanjut dijelaskan oleh Djarot Syaiful Hidayat dari hasil wawancara penulis:

"...Karena itu, Mereka-meraka yang ikut sebagai peserta Sekolah Partai harus menerima kesetiaan yang disebut Dasa Sila Partai, mulai dari ideologi Pancasila sampai dengan persoalan simulasi hukum. Itulah yang harus mereka perjuangkan, ketika mereka mendapatkan Amanah sebagai kepala daerah. Kesetiaan untuk memenuhi janji, sebagai pakta integritas, sebagai kontrak sosial. Sehingga dalam menyusun visi dan misi kepala daerah harus selaras dengan UUD'45, harus selaras dengan visi-misi Presiden....Jadi ini materi-materi ada muatan ideologi normatif, ada muatan operasional, yaitu menterjemahkan ideologi Pancasila akan kebijakan pemerintahan daerah dan Trisakti.

Sekolah Partai menjadi rancangan institusi kepemimpinan PDI dalam suatu kebijakan ideologi Partai dalam membentuk tata kelola pemerintahan sebagai tata kelola partai yang dituangkan dalam asas dan ideologi Partai.

Tipe Kepartaian PDI Perjuangan dan *Design Institution* Sekolah Partai

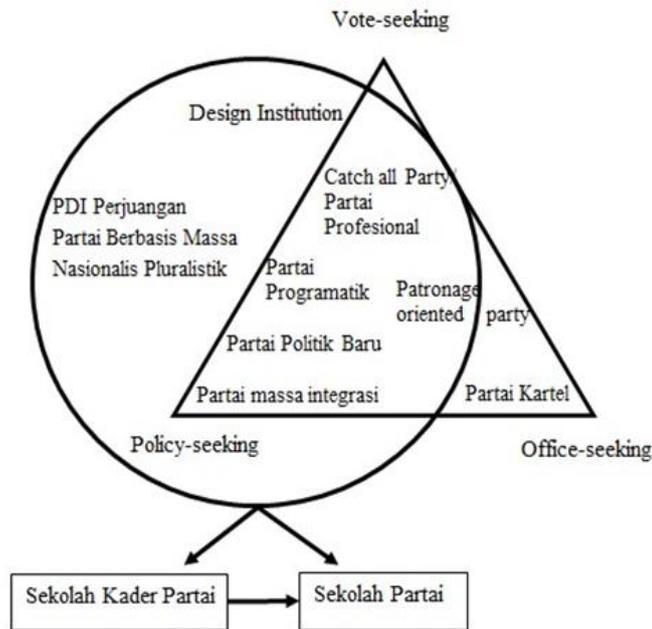
Partai politik dinyatakan sebagai model kelembagaan politik bila mampu merancang kapasitas partai dalam menghasilkan sumber daya manusia yang handal, sumber keuangan yang mencukupi, sistematisasi pengorganisasian yang kuat, membentuk kepemimpinan yang tangguh, dan aturan kepartaian yang baik. Dengan tiga kriteria; *Pertama*, didasarkan atas fungsi dan performa organisasi kepartaian sebagai partai berbasis elit atau sebagai partai berbasis massa. *Kedua*, didasarkan pada sikap perilaku (*behaviouristic*) yaitu partai yang menekankan suatu bentuk toleransi pluralistik atau sebagai partai dengan penekanan anti sistem (*proto-hegemonic*). *Ketiga*, didasarkan atas karakteristik partai sebagai partai dengan penekanan programatik atau berdasarkan pada aspek ideologis (Gunther & Diamond, 2001; Pamungkas, 2012).

PDI yang terlahir dari proses transisi politik, yang terawali dari hasil pemfusan partai pada 10 Januari 1973, dan melakukan suatu resistensi terhadap Orde Baru dalam memasuki awal tuntutan reformasi, hingga pada paska reformasi tahun 1999

terbentuknya PDI Perjuangan guna dapat mengikuti suatu proses pemilu 1999 adalah pemilu awal dari adanya transisi politik, Orde Baru ke arah Refomasi. PDI Perjuangan sebagai tipe partai Berbasis Massa dengan aspek ideologis Nasionalistik kebangsaan dengan penekanan pada toleransi *pluralistic*. Pemilu secara periodik menghasilkan partai-partai baru dan menjadi transformasi dari partai-partai yang ada, dan mengarah pada orientasi partai yang menghasilkan tipe perilaku partai (Wolinetz, 2002). Orientasi yang idealnya berpijak pada terbangunnya kebijakan partai seringkali dipengaruhi oleh adanya pengaruh figur politik di daerah, kedekatan dengan sumber kekuasaan, dan dinasti politik yang mengarah pada tipikalisasi *Catch all party* dengan orientasi pada spekulasi jumlah suara (*vote seeking*) dan partai kartel dalam penguasaan birokrasi (*official seeking*).

PDI Perjuangan dengan ideologisasi nasional kebangsaan mengarah sebagai partai berbasis massa dengan ideologisasi nasionalisme kebangsaan secara terbuka dan pluralistik cenderung membangun dan mengembangkan programatik ideologisasi partai yang secara terbuka bagi kerjasama politik dengan mengarus-utamakan ideologi negara, guna dapat mengontrol integralistik sosial kebangsaan dalam membentuk pemerintahan daerah yang didorong dari adanya pemilihan umum (Gunther & Diamond, 2001). Adanya orientasi partai dan idealisasi PDI Perjuangan sebagai partai yang mengutamakan kebijakan partai dalam pencapaian visi misi partai menjadikan PDI Perjuangan membangun rancangan institusi melalui penyelenggaraan Sekolah Partai dalam mempersiapkan anggota dan kader internal partai untuk diusung sebagai agenda utama PDI Perjuangan menghasilkan petugas partai dalam jabatan publik sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini sebagai upaya PDI Perjuangan untuk mereduksi dan mengeliminasi adanya dampak dari pengaruh figure politik yang telah terekomendasi menjadi cakada baik yang diusung maupun yang didukung oleh DPP Partai, dari adanya *patronase*. Serta menghindari suatu bentuk kartel politik. Seperti gambar di halaman berikut ini

Gambar 3. Tipe Orientasi Kepartaian PDI Perjuangan



Sumber: hasil olahan penulis dengan mencampurkan teori tipologi partai menurut Gunther & Diamond (2003, p. 173) dan Wolinetz (2002, p. 161)

Sekolah Kader Partai dan Sekolah Partai adalah pendidikan politik bagi peningkatan kapasitas anggota dan kader partai. Dalam perkembangan kepemiluan dengan dasar UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan adanya sistem *presidential threshold*, mempengaruhi pemilihan kepala daerah serentak yang pada akhirnya partai politik melakukan suatu orientasi pemenangan pemilu dengan mengarah pada *vote-seeking* dan bahkan pada *office-seeking* dengan melibatkan pejabat birokrat daerah dijadikan kandidat dalam pilkada serentak. Hal inilah dalam Kongres IV PDI Perjuangan Tahun 2015 telah merancang suatu pola pendidikan politik bagi Cakada agar adanya suatu penanaman ideologi kepartaian PDI Perjuangan bagi peserta dari kader partai lain, yang terekomendasi mendapatkan dukungan dari DPP Partai, sebagai hasil komunikasi politik PDI Perjuangan melalui DPC dan DPD, untuk membangun arah koalisi dalam bursa Pilkada Serentak 2020.

Hal ini Kongres PDI Perjuangan sebagai rapat tertinggi Partai, seperti yang dikatakan Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Kongres V tahun 2019 di Bali:

"...Kongres adalah ruang musyawarah mufakat untuk merumuskan dan memutuskan strategi, yaitu berupa langkah kongkret Partai. Kongres akan memutuskan satu pedoman untuk melakukan evaluasi sekaligus menjadi ajang konsolidasi Tiga Pilar Partai, yaitu kader partai yang ditugaskan di struktur, legislatif, dan eksekutif. Kongrespun akan memutuskan satu pedoman interaksi politik antara Partai dan Pemerintah, untuk melahirkan sinkronisasi kebijakan politik pembangunan yang etis,

ilmiah dan sekaligus ideologis.... PDI Perjuangan harus menjadi partai yang memiliki satu kedisiplinan penuh, satu disiplin ideologi, satu disiplin teori, satu disiplin tindakan, dan satu disiplin gerakan. (Channel youtube cnnindonesia, 2019).

PDI Perjuangan melalui pelaksanaan Kogres membangun programatik ideologis kepartaian guna menghasilkan arah dan tujuan partai yang menurut Huntington, terbangunnya suatu ranah institusionalisasi untuk memperluas dan meningkatkan partisipasi dan kapasitas politik dalam periodeisasi kerja para petugas partai (Fajri, 2019). PDI Perjuangan melalui pelaksanaan Kongres memberikan tipe kepartaian PDI Perjuangan yang secara dinamis melakukan suatu pengadaptasian dengan mempertahankan jati diri kepartaian yang dipengaruhi oleh ideologisasi kepartaian PNI. Dalam setiap kongres PDI Perjuangan memproklamirkan sebagai Partai berbasis ideologis dan berbasis massa serta penekanan dalam penguatan kader. Kongres Partai sebagai Rapat Tertinggi Partai seperti yang telah dikatakan oleh Megawati, bahwa melalui Kongres untuk melahirkan sinkronisasi kebijakan politik. Serta bertitik tumpu dalam progrmatik Partai agar dapat berjalannya visi dan misi kebijakan ideologis Partai. Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam setiap kongres partai (Kristiyanto, 2020), yaitu;

1. Kongres I tahun 2000, sebagai upaya PDI Perjuangan melakukan transisi politik dalam membangun Struktur Partai berupa kesadaran; ideologi, politik, organisasi, lingkungan, dan untuk menyelesaikan masalah rakyat.
2. Kongres II tahun 2005, konsolidasi ideologis sebagai konsolidasi demokrasi dengan menjadi oposisi PDI Perjuangan terus menerus melakukan konsolidasi melalui penyelenggaraan pendidikan kader dalam perencanaannya mempersiapkan pemilihan kepala daerah langsung tahun 2005 dan kelanjutannya.
3. Kongres III tahun 2010, penegasan sebagai Partai Ideologi dan sekaligus menjabarkan platform perjuangan partai guna mewujudkan dasar-dasar bekerjanya Trisakti. PDI Perjuangan sebagai Partai Ideologi melakukan suatu disiplinasi bagi kader dan anggotanya untuk tetap menjadi oposisi.
4. Kongres IV Tahun 2015, PDI Perjuangan melakukan suatu komitmen menjadi Partai Pelopor, sebagai partai yang pertama memasukan ajaran dan pemikiran Bung Karno masuk dalam AD ART Partai. Ajaran-ajaran Bung Karno menjadi materi wajib dalam setiap kaderisasi dan pendidikan politik, termasuk dalam penyelenggaraan Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai bagi Petugas Partai yang akan menduduki jabatan Struktural melalui mekanisme jenjang kepartaian yang ditetapkan oleh DPP Partai, serta untuk menduduki jabatan Legislatif dan Eksekutif melalui mekanisme Pemilihan Umum.

5. Kongres V Tahun 2019, sebagai kongres yang dipercepat sebagai upaya Partai mempersiapkan pilkada serentak 2020, dan dalam pidato Kongres V yang dibawakan Ketua Umum Partai memberikan suatu penekanan bahwa PDI Perjuangan sebagai Partai Pelopor, partai yang solid bergerak (Tribunnews.com, 2019).

Partai pelopor menurut Megawati Soekarnoputri adalah partai yang mampu menciptakan sekaligus menjalankan gagasan dalam organisasi, dan berdisiplin (Kristiyanto, 2020). Dengan menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai pelopor, maka DPP Partai mengklaim sebagai partai yang pertama kali dalam menyelenggaraan Sekolah Partai bagi calon kepala daerah pada pilkada serentak 2015.

Seperti dikatakan oleh Firman Manan sebagai staff pengajar Universitas Padjajaran (Kompas.com, 2015), penyelenggaraan Sekolah Partai memiliki tiga hal dalam menghasilkan kepemimpinan politik bagi eksekutif daerah, yaitu; *Pertama*, Sekolah Partai memperkuat kapasitas personal calon kepala daerah dari sisi kompetensi dan integritas calon sehingga mampu bersaing dalam pilkada sekaligus memiliki kesiapan untuk mengelola pemerintahan apabila terpilih menjadi kepala daerah. *Kedua*, Sekolah Partai membantu calon kepala daerah untuk merumuskan visi, misi serta tawaran kebijakan yang pro rakyat dengan mengacu pada ideologi partai akan tergambar dalam visi, misi serta program yang diusung para kader PDI Perjuangan yang akan bertarung dalam pilkada. *Ketiga*, Sekolah Partai membangun konsolidasi partai untuk membangun strategi pemenangan, sehingga dukungan mesin partai dalam menghadapi pilkada dapat dioptimalkan.

Dalam penyelenggaraan Sekolah Partai untuk persiapan pilkada 2017 dan 2018 tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan Sekolah Partai 2015, dikarenakan waktu penyelenggaraan dilaksanakan secara estafet yaitu pelaksanaan pilkada serentak secara beruntun. Sehingga fungsi Sekolah Partai dikatakan oleh Komarudin Watubun (tribunnews, 2016). *Pertama*, menguatkan calon kepala daerah untuk merumuskan visi, misi serta tawaran kebijakan yang pro rakyat dengan mengacu pada ideologi Partai. *Kedua*, memberikan penguatan kapasitas para personal calon kepala daerah dari sisi kompetensi dan integritas dalam mempersiapkan diri sebagai pengelola pemerintahan. *Ketiga*, membangun konsolidasi partai dan mesin partai dalam menghadapi pilkada. Sehingga Sekolah Partai menjadi platform bagi PDI Perjuangan dalam merancang dan menghasilkan kepemimpinan eksekutif daerah. Tujuannya adalah terbentuknya keselarasan pemerintahan daerah dengan Presiden, yang adalah petugas Partai bagi PDI Perjuangan. Maka untuk mencapai keselarasan tersebut, Sekolah Partai menjadi agregasi bagi PDI Perjuangan dalam memberikan pendidikan politik dan doktrinasi ideologi Partai bagi calon kepala daerah.

Agregasi Politik PDI Perjuangan dan Koalisi Pemilihan Kepala Daerah

Penyelenggaraan Sekolah Partai PDI Perjuangan bagi calon kepala daerah 2020, adalah penyelenggaraan dengan kondisi *pandemic Covid-19*, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara *daring*. Sekolah Partai bagi calon kepala daerah sebagai sesuatu yang unik, selain dilakukan secara *daring*. Peserta Sekolah Partai diikuti oleh para pemuda dan calon lainnya yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, serta adanya pola interaksi antar partai politik dalam membangun koalisi pada pilkada serentak 2020.

Peserta Sekolah Partai yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, bahkan secara langsung memiliki tali hubungan darah baik dengan elit partai politik dan kekuasaan dalam hal ini peserta yang diusung oleh DPP Partai, sehingga adanya suatu unsur munculnya dinasti politik dalam Pilkada Serentak 2020. Seperti halnya, calon Walikota Medan dan calon Walikota Solo memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo ataupun calon Bupati Kediri adalah putra Pramono Anung, yang menjadi sorotan masyarakat dalam pilkada serentak 2020. (aa.com, 2020).

Nagara Institute mencatat, PDI Perjuangan menempati posisi kedua dalam melakukan dinasti politik akan pilkada serentak 2020, sebesar 12,4%, setelah Golkar sebagai posisi pertama sebesar 12,9%. Dalam catatan Nagara Institute ada 9 partai politik yang mengusung calon kepala daerah dengan memiliki kedekatan dengan elit partai ataupun dengan kekuasaan dalam pemerintahan daerah sebelumnya. (Syauket, 2020). Adanya dinasti politik tersebut, dinegasikan dan disangkal oleh partai pengusung. Seperti halnya yang dikatakan oleh Hasto Kristiyanto dalam diskusi virtual (Tribunnews.com, 2020):

"...Pihaknya menilai tuduhan politik dinasti yang disuarakan kelompok tertentu terhadap Gibran Rakabuming tak mendasar. Sebab, masyarakat yang akan menentukan keterpilihan sosok berdasarkan kinerja, pengalaman, dan kepemimpinannya. Dalam era demokrasi di mana pelaksanaan pemilu adalah secara langsung, proses pendidikan politik berjalan cepat. Dampaknya proses demokrasi meningkatkan rasional publik. Masyarakat pada akhirnya melihat rasional. Yang dilihat adalah aspek kepemimpinan, aspek kerja, aspek terhadap berbagai program yang ditawarkan oleh calon pemimpin, itu yang tetap menjadi dominan, dan menjadi referensi dari masyarakat untuk memilih. Kaderisasi politik memang dimulai dari keluarga dan pendidikan itu bukan menjadi fenomena tunggal. Bagi PDI Perjuangan itu terjadi di banyak partai. Hampir di seluruh partai politik. Yang penting di dalam proses menyiapkan seseorang menjadi pemimpin itulah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Pihaknya mewajibkan setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengikuti Sekolah Partai." (Tribunnews.com, 2020).

Upaya PDI Perjuangan menegaskan sebagai partai yang melakukan praktek dinasti politik, adalah menggerakkan tiga pilar partai yang secara konsisten melakukan penyelenggaraan pendidikan kader dan Sekolah Partai. Kemudian PDI Perjuangan mempublikasikan proses calon kepala daerah dan terekomendasi untuk dapat mengikuti Sekolah Partai. Sehingga Sekolah Partai dalam mempersiapkan calon kepala daerah menjadikan kontestasi pilkada serentak sebagai suatu prinsip *equality of opportunity* yang dihormati secara rasional bagi konsituen dari adanya kompetisi jabatan publik yang diharapkan tidak adanya manupulasi dan politik pencitraan melalui adanya mobilisasi aparatur pemerintahan, sehingga pilkada serentak diharapkan menghasilkan suatu hal yang bersifat bebas dan adil (*free and fair competition*). Walaupun dikhawatirkan terjadinya pemusatan kekuasaan di keluarga atau kerabat politik tertentu (Harjanto, 2011).

Maka melalui Sekolah Partai, setiap calon kepala daerah harus mampu menyelaraskan visi dan misi sebagai kepala daerah dengan Presiden dalam rencana penyusunan kebijakan daerah yang dapat selaras dengan kebijakan Presiden. Namun tidak menutup kemungkinan adanya hubungan dan keterkaitan calon kepala daerah yang mengikuti sekolah partai dengan elit dan sumber kekuasaan sebagai aktor politik. Hal inilah yang menjadi tugas PDI Perjuangan dengan tiga pilar partainya untuk menghindari kekhawatiran masyarakat sebagai konstituen terhadap adanya pemusatan kekuasaan kerabat politik tertentu. PDI Perjuangan melalui Sekolah Partai berupaya menghasilkan suatu reputasi kepemimpinan, dengan tipe kepemimpinan yang berorientasi dalam pendekatan struktural pada isu-isu institusional dan penyusunan kebijakan. Untuk dapat terarah mempersiapkan kepemimpinan politik eksekutif daerah dengan berfokus pada gagasan, norma dan kapasitas kepemimpinan sehingga menghasilkan tipe kepemimpinan konstruktif (Kosandi, 2021).

Tugas tersebut sebagai fungsi partai politik dalam melakukan agregasi politik untuk menghasilkan kepemimpinan yaitu memberikan pesan moral, keyakinan dan konsistensi. Bahkan untuk membangun arah koalisi, sehingga partai politik dalam hal ini PDI Perjuangan secara kategoris untuk dapat merancang nilai moral dalam merujuk keputusan politik dan aksi politik terhadap prinsip utama demokrasi (Adinugroho, 2016). Untuk tujuan penyelarasan visi misi kepala daerah dengan Presiden sebagai bentuk kebijakan ideologis PDI Perjuangan dalam mengatur tata kelola negara yang juga adalah bagian dalam tata kelola Partai.

Dalam hal ini PDI Perjuangan melakukan agregasi politik bagi setiap calon kepala daerah, dan dengan penyelenggaraan Sekolah Partai sebagai alat propaganda PDI Perjuangan akan isu-isu kebijakan ideologis. Hal ini dikarenakan belum adanya

Haluan Negara yang tersusun sejak reformasi, seperti yang disampaikan oleh Djarot Syaiful Hidayat:

"...Dasa Prasetya itu yang harus diperjuangkan ketika dia mendapatkan amanat sebagai Kepala Daerah. Sepuluh Janji kesetiaan, kesetiaan dalam memenuhi sepuluh janji semacam pakta integritas, semacam kontrak politik bagi kepala daerah, untuk menyusun kebijakan program. Sehingga program-program harian itu menyusun kebijakan program harus mencerminkan, harus mewujudkan sepuluh janji. Termasuk juga kemarin yang 2019 itu kita tertibkan untuk penyusunan visi dan misi calon kepala daerah. Visinya harus selaras, misinya harus selaras dengan program Partai, selaras dengan visinya Presiden. Karena kita masih belum punya itu. Haluan Negara, ya toh. Harus selaras, sehingga visi dan misi pemerintahan pusat, propinsi, pemerintahan kota-kota dan kabupaten itu selaras. Ini perintah dari Sekolah Partai, kita godok."

Dengan demikian Sekolah Partai sebagai pembentukan karakter dan perilaku politik calon kepala daerah yang dirancang oleh tiga pilar Partai. Bahwa PDI Perjuangan dengan tiga pilar partai yaitu Struktural, Legislatif dan Eksekutif sebagai aktor politik dalam merancang kelembagaan kepemimpinan politik bagi eksekutif daerah, dengan penekanan akan Dasa Prasetya Partai. Sekolah Partai pun sebagai suatu rancangan institusi PDI Perjuangan dalam mempersiapkan calon kepala daerah, untuk dapat melaksanakan kontrak politik.

PENUTUP

Pendidikan politik bagi calon kepala daerah merupakan salah satu fungsi pelembagaan politik untuk menghasilkan kepemimpinan politik bagi eksekutif, dilakukan oleh partai politik sebagai institusi politik. Dalam menghasilkan kepemimpinan tersebut partai politik perlu merancang suatu proses pengkaderan dan kaderisasi, guna menghasilkan suatu seleksi dan rekomendasi.

Pendirian sekolah partai yang diselenggarakan oleh partai politik, seperti PDI Perjuangan untuk mempersiapkan kepemimpinan politik dalam tiga pilar partai. Persiapan bagi calon kepala daerah pada Sekolah Partai 2020 yang diselenggarakan oleh DPP Partai adalah untuk peningkatan kapasitas calon kepala daerah untuk dapat menyelaraskan antara pemerintahan daerah yang terbentuk melalui pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sekolah Partai menjadi program strategis bagi PDI Perjuangan dalam mempersiapkan kepemimpinan politik secara berjenjang dan berkonsistensi bagi pembangunan kapasitas kepemimpinan melalui pengkaderan dan kaderisasi, yang dihasilkan melalui hasil Kongres Partai. Dengan menetapkan suatu rekomendasi bagi kader internal dan anggota partai untuk menjadi petugas Partai sebagai calon

eksekutif daerah. Namun Sekolah Partai pun besikap terbuka bagi calon kader partai politik lain di tingkat daerah, yang mau membangun komunikasi dengan struktural PDI Perjuangan di tingkat DPC (Dewan Pimpinan Cabang) dan DPD (Dewan Pimpinan Daerah), supaya mendapatkan dukungan rekomendasi dari DPP Partai. Sehingga terbangunnya suatu koalisi dan aliansi dalam pemberian dukungan bagi calon kepala daerah. Dukungan tersebut adalah setiap calon kepala daerah atau wakil kepala daerah mau mengikuti Sekolah Partai, dan melalui Sekolah Partai akan terbangunnya kontrak politik bagi calon eksekutif daerah dengan PDI Perjuangan. Kontrak politik tersebut adalah suatu bentuk kepatuhan dalam menyelaraskan setiap kebijakan kepala daerah dengan kebijakan Presiden yang adalah juga kebijakan PDI Perjuangan. Suatu bentuk disiplin penuh dari hasil Kongres V PDI Perjuangan yang harus dipatuhi oleh setiap calon eksekutif daerah baik yang diusung dan yang didukung oleh DPP Partai.

Sekolah Politik bagi calon eksekutif daerah pada pilkada 2020 yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan, sarat dengan suatu bentuk dinasti politik, yaitu adanya beberapa calon kepala daerah memiliki kekerabatan dan hubungan darah baik dengan elit partai ataupun memiliki hubungan dengan kekuasaan. Akan tetapi Sekolah Partai melakukan suatu upaya penegasian terhadap adanya praktek dinasti politik. Karena setiap calon terutama yang diusung oleh tingkatan DPC, DPD, dan DPP memiliki kesamaan pandangan terhadap calon eksekutif daerah tersebut. Terlebih adanya *fit and proper test* bagi calon eksekutif daerah dan melalui proses wawancara dan tes psikologi yang dilakukan oleh Struktural Partai. Penegasian tersebut telah dirancang oleh DPP Partai dalam fungsinya menghasilkan dan mempersiapkan kepemimpinan politik, yaitu bagi calon eksekutif daerah. Terlebih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan terpilih tersebut akan mengikuti kontestasi dalam pemilihan langsung, yang ditentukan oleh masyarakat sebagai konstituen bagi kepemimpinan politik. Maka perlunya adanya suatu proses pengkaderan dan kaderisasi secara meritokrasi dengan penekanan pada nilai-nilai loyalitas ideologi partai, termasuk pula dari kader partai lain yang terekomendasi akan dukungan DPP PDI Perjuangan, sehingga wajib untuk mengikuti Sekolah Partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi ed.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Callan, E. (1997). *Creating Citizenship: Political Education and Liberal Democracy*. Oxford: Oxford Political Theory-Clarendon.

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methodes Approaches* (4 ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publication.
- Fajri, M. N. (2019). Penguatan Pelembagaan Politik Melalui Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik. *Call For Paper UII*. <http://fh.uui.ac.id>. Diakses 14 Januari 2022
- Goodin, R. E. (1998). Institutions and Their Design. In R. E. Goodin (Ed.), *The Theory of Institution Design* (pp. 1-53). New York: Cambridge University Press.
- Goodin, R. E. (2008). *Innovating Democracy: Democratic Theory and Practice After Deliberative Turn*. Oxford: Oxford University Press.
- Goodin, R. E. (2013). *The Oxford Handbook of Political Science*. New York: Oxford University Press.
- Goodin, R. E., & Tilly, C. (2013). *The Oxford Handbook of Contextual Political Anaysis*. (T. Goodin, Ed.) Oxford: Oxford University Press.
- Gunther, R., & Diamond, L. (2001). Types and Function of Parties. In L. Diamond, R. Gunther, L. Diamond, & R. Gunther (Eds.), *Political Parties and Democracy* (pp. 3-39). The Johns Hopkins University Press.
- Gunther, R., & Diamond, L. (2003). Species of Political Parties. *Party Politics, Vol.9 No.2*, 167-199. London: SAGE Publication
- Harjanto, N. (2011). Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. *Analisis CSIS, Vol.40, No2*, 138-159. Retrieved from https://www.academia.edu/11290710/Politik_Kekerabatan_dan_Institusionalisasi_Partai_Politik_di_Indonesia
- Heyword, A. (2013). *Politics*. New York: The Palgrave Macmillan.
- Koopmans, T. (2003). *Courts and Political Institution: A Comparative View*. Cambridge: University Press.
- Kosandi, M. (2021). Political Leadership and The Shaping of Indonesian Democracy. *Indonesia Journal of Political Research (IJPR), Volume 2, Juni 2021*, 29-40. Diakses November 29, 2021

- Kristiyanto, H. (2020). *Strategi Mewujudkan PDI Perjuangan Menjadi Partai Pelopor*. (Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Performer) Sekolah Partai bagi Calon Kepala Daerah. Gelombang pertama, 21-25 Agustus 2020, Jakarta.
- Lee, C. P. (2015). *Training the Party: Party Adaption and Elite Training in Reform Era China*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lowndes, V., & Roberts, M. (2013). *Why Institution Matter: The New Institutionalism in Political Science*. New York: Series Political Analysis, Palgrave-Macmillan.
- Meydani, A. (2009). *Political Transformation and Political Entrepreneurs*. New York: Palgrave-Macmillan.
- Pamungkas, S. (2012). *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia* (Revisi ed.). Yogyakarta: Institute for Democracy Welfarism.
- Peterson, A. (2019). *Civility and democratic education*. Birmingham: Springer Briefs in Education: Citizenship education for The 21st Century. doi:<https://doi.org/10.1007/978-981-15-14014-4>
- Schumpeter, J. (1994). *Capitalism, socialism, and democracy*. New York: Taylor & Francis e-Library 2003.
- Shepsle, K. A. (1998). Political Deals in Institutional Setting. In R. E. Goodin, & R. E. Goodin (Ed.), *The Theory of Institution* (pp. 227-239). New York: Cambridge university Press.
- Sirivunnabood, P. (2016). Political Education: The Role of Political Parties in Educating Civil Society on Politics. *Journal of Social Sciences, Humanities, And Arts, Vol.16 (3)*, 157-194.
- Smith, G. (2009). *Democratic Inovations: Designing Institution for Citizen Participation*. Cambride : Cambridge university press.
- Surbakti, R (2011). *Membangun SistemKepartaian Pluralisme Moderat: Menyederhanakan Jumlah Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Syauket, A. (2020). *Membangun Dinasti Politik Oligarki yang Korup (Fenomena Pilkada Serentak 2020)*. Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka.

- Thilo Lang. (2018). *Institutional Theory, New*. Dalam T. B. Sociology, & G. R. Rojek (Ed.). John Wiley & Son, Ltd. doi:10.1002/9781405165518.wbwosi050.pub2
- Toshkov, D. (2016). *Research Design in Political Science*. London: Political Analysis Palgrave.
- Wolinetz, S. B. (2002). Beyond the Catch All: Approach to the Study of Parties and Party Organization in Contemporary Democracies. Dalam R. Gunther, J. R. Montero, J. J. Linz, R. Gunther, J. R. Montero, & J. Linz (Eds.), *Political Parties: Old Concepts and New Challenges* (pp. 136-165). New York: Oxford University Press.
- Yodi, A. S. (2017). Kombinasi untuk Penguatan Demokrasi: Kapaistas Lembaga Representasi Politik di Surakarta oleh PDIP dan KOMPIP. *Politik Indonesia*, 121-141. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI>, diakses 17 Januari 2022
- Zuhro, R. S. (2019). Parpol dan Pendidikan Politik. *kompas.id*. Retrieved 8 18, 2021, from [kompas.id: https://www.kompas.id/baca/utama/2019/12/05/parpol-dan-pendidikan-politik-2](https://www.kompas.id/baca/utama/2019/12/05/parpol-dan-pendidikan-politik-2), diakses 18 Agustus 2021
- aa.com. (2020). Analisis: Wajah politik dinasti Indonesia dalam Pilkada 2020. (M. N. Latief, & E. Permana, Eds.) Retrieved from Anadolu Agency: <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/analisis-wajah-politik-dinasti-indonesia-dalam-pilkada-2020/1939399>
- Channel youtube cnnindonesia. (2019). *CNNIndonesia*. Retrieved from CNNIndonesia: <https://www.youtube.com/watch?v=gOYRmlai25k&t+6s>, diakses 21 November 2021
- cnnindonesia.com. (2020). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200913183047>. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com>
- Kompas.com. (2015). Sekolah Partai Ala PDI Perjuangan Diapresiasi. *Sekolah Partai Ala PDI Perjuangan Diapresiasi*. (F. A. Permana, Ed.) Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2015/06/29/03354371/Sekolah.Partai.Ala.PDI.Perjuangan.Diapresiasi>
- Tribunnews. (2016). 80% Peserta Sekolah Partai Menang Pilkada Kata Komarudin Watubun. *80% Peserta Sekolah Partai Menang Pilkada Kata Komarudin Watubun*.

Retrieved from <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/09/03/80-peserta-sekolah-partai-menang-di-pilkada-kata-komarudin-watubun>

Tribunnews.com. (2020). Politik Dinasti untuk Gibran? Hasto Bilang Itu Tuduhan Tak Mendasar. (C. Umam, & M. Haryadi, Eds.) Retrieved from Tribunnews.com: <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/24/politik-dinasti-untuk-gibran-hasto-bilang-itu-tuduhan-tak-mendasar?page=1>